

Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang

Empowerment of Tourism Moving Groups in Sumedang Regency

Dadan Setia Nugraha* & Zulfikar Setia Firdaus

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas April, Indonesia

Diterima: 27 Maret 2022; Direview: 27 Maret 2022; Disetujui: 16 Mei 2022

*Corresponding Email: dadan_setia@unsap.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan kelompok dan faktor penghambat pemberdayaan kelompok. Acuan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan kelompok menurut Akadun (2005) yang terdiri dari daya sosial, daya politik, dan daya psikologi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata berupa kompetensi kelompok penggerak pariwisata yang masih minim didalam mengelola objek wisata di masing-masing Desa dan kurangnya sarana dan prasana didalam pengelolaan objek wisata yang menyebabkan beberapa fasilitas di objek wisata tidak terawat dengan baik.

Kata Kunci: Pemberdayaan Kelompok; Manajemen Sumber Daya Manusia.

Abstract

This study aims to determine how the empowerment of tourism driving groups in Sumedang Regency. The focus of the problem in this research is on group empowerment and the inhibiting factors of group empowerment. The theoretical reference used is the theory of group empowerment according to Akadun (2005) which consists of social power, political power, and psychological power. The research method uses qualitative methods with data collection techniques through library research and field studies. The results showed that the empowerment of tourism driving groups in Sumedang Regency has been going quite well. The inhibiting factors in empowering tourism driving groups are the competence of tourism driving groups which are still minimal in managing tourism objects in each village and the lack of facilities and infrastructure in managing tourism objects which causes some of the facilities at tourist objects not to be maintained properly.

Keywords: Group Empowerment; Human Resources Management.

How to Cite: Nugraha, D.S. & Firdaus, Z.S., (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(1): 304-313.



PENDAHULUAN

Pariwisata sering dipandang sebagai sektor yang sangat terkemuka dalam ekonomi dunia. Dalam UU RI No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pengertian Pariwisata sendiri dijelaskan Sinaga (2010) merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan semata. Pariwisata terbagi kedalam dua kategori sebagaimana yang dijelaskan Suryadana dan Octavia (2015) berdasarkan jenisnya, pariwisata dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- (1) Wisata alam, yang terdiri dari: a. Wisata Pantai (*Marine Tourism*); b. Wisata Etnik (*Etnik Tourism*); c. Wisata Cagar Alam (*Ecotourism*); d. Wisata Buru; e. Wisata Agro.
- (2) Wisata Sosial - Budaya, yang terdiri dari: a. Monumen nasional; b. Museum dan fasilitas budaya lainnya.

Kabupaten Sumedang memiliki 37 obyek wisata yang memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Dimana beberapa jenis obyek wisata yang dimiliki terdiri dari; obyek pegunungan, air terjun, objek wisata religi, maupun obyek wisata buatan Waduk Jatigede, Kampung Toga, Curug Cinulang, Museum Prabu Geusan Ulun, Wisata Air Gajah Depa, Tahura Gunung Kunci, Kolam Renang Ranca Goyang.

Banyaknya objek wisata yang ada di Kabupaten Sumedang mendorong diadakannya sebuah kegiatan pemberdayaan yang ditujukan untuk Kelompok Penggerak Pariwisata dalam rangka mengembangkan, mengelola, dan menggali potensi objek wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Kemajuan pariwisata tidak terlepas dari partisipasi berbagai elemen yang ada pada lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas terkait, organisasi masyarakat, sampai masyarakat itu sendiri. Hal ini seperti mata rantai yang tidak dapat terpisahkan demi menunjang kemajuan pariwisata baik ditingkat nasional maupun di daerah. Campur tangan pemerintah dalam memajukan pariwisata akan berjalan maksimal apabila didukung oleh masyarakat yang bersinergi mempunyai visi dan misi yang selaras dengan pemerintah demi tujuan terciptanya kesejahteraan bersama dan untuk dinikmati bersama.

Kompepar dibentuk berdasarkan ketentuan dan kebijakan pemerintah, yang dalam pengelolaannya dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia yakni masyarakat yang ada di kawasan pariwisata bersangkutan. Oleh karena diyakini, bahwa masyarakat sekitar kawasan tersebut (ODTW) akan lebih mengerti dan mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya sendiri. Masyarakat di sekitar OTDW akan mengetahui benar tentang potensi dan aspek – aspek lain yang menunjang kepariwisataan; misalnya aspek sosial, potensi alam lingkungan hidup, sejarah, dan adat istiadat budaya daerahnya.

Kementerian Pariwisata dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata menggagas suatu pedoman pembentukan kelompok yang dinamakan kelompok penggerak pariwisata (kompepar) yang mana tujuan pedoman penyusunan kelompok sadar wisata adalah;

1. Menyediakan pedoman dalam rangka Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah maupun masyarakat serta pihak-pihak terkait;
2. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Untuk membantu mewujudkan dua poin tersebut diperlukan juga penguatan organisasi kepariwisataan juga masyarakat daerah wisata yang mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 4 2025 bahwa dalam pembangunan kepariwisataan meliputi penguatan Organisasi Kepariwisata, dan pembangunan SDM Pariwisata.

Adapun aktivitas sosial yang dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata berupaya untuk: a) Meningkatkan pemahaman kepariwisataan; b) Meningkatkan peran dan partisipasi



masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan; c) Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota kelompok penggerak pariwisata; dan d) Mensukseskan pembangunan Kepariwisata. Oleh sebab Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mengambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang perlu mengadakan suatu program kegiatan pemberdayaan yang melibatkan kelompok penggerak pariwisata dalam rangka mengembangkan dan melestarikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sumedang.

Pemberdayaan menurut Akadun (2005) adalah sebagai daya upaya yang memungkinkan sumber daya manusia suatu organisasi (birokrasi, instansi, perusahaan) dapat memaksimalkan segala potensi diri dan lingkungannya untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi dimana sumber daya manusia itu bekerja. Pemberdayaan dimaknai oleh Nippi (2019) sebagai pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan juga mendorong perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang orang sebelumnya yang kurang mampu bersaing akhirnya menjadi mampu memiliki daya saing untuk berbuat sesuai potensi yang dimilikinya.

Dengan adanya pemberdayaan yang diberikan kepada kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang dapat mengembangkan berbagai destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Sumedang berupa wisata alam, wisata buatan, wisata religi, dan lain sebagainya sehingga dapat memajukan perekonomian daerah khususnya Kabupaten Sumedang dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana juga untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangestika (2019) memaparkan bahwa pemberdayaan kelompok dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan bimbingan teknis. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok yaitu keterbatasan anggota kelompok, dan kurangnya pemahaman serta partisipasi dari anggota kelompok pada kegiatan pemberdayaan. Selanjutnya hasil penelitian Rindi (2019) memaparkan bahwa optimalisasi pemberdayaan kelompok dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengembangan sumber daya manusia dari anggota kelompok tersebut, membangun kemitraan dengan pihak lain atau stakeholder terkait pengembangan kelompok, dan melakukan pembinaan terhadap kelompok secara berkala. Adapun hasil penelitian Rahmawati (2019) memaparkan bahwa pemberdayaan kelompok dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama dengan mitra. Adapun tahapan kerjasama terdiri dari tahap pemetaan atau pendataan potensi-potensi, tahap penyamaan persepsi, tahap perencanaan program,

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih mendalam terkait pemberdayaan kelompok di sektor pariwisata desa. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan dan faktor penghambat pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang?. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang serta faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tahapan prosedur pengolahan data yang terdiri dari data reduksi, penyajian data,



dan penarikan kesimpulan. Adapun informan penelitian adalah beberapa unsur Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Kepala Seksi Industri Wisata, Kepala Seksi Objek Daya Tarik Wisata dan staf bidang pariwisata. Selain itu penelitian ini pun melibatkan unsur ketua Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang

Untuk mengukur pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata, peneliti mengacu pada teori pemberdayaan Akadun (2005) yang terdiri dari daya sosial, daya politik, dan daya psikologis. Daya sosial menurut Akadun (2005) menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi di atas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Peningkatan daya sosial dapat di mengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produksi mereka. Hasil penelitian untuk daya sosial menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan untuk memudahkan dalam mengakses segala informasi yang berkaitan dengan kelompok penggerak pariwisata sudah terpenuhi dengan memberikan akses promosi melalui media sosial dengan bekerjasama dengan beberapa selebgram asal Sumedang maupun artis ibu kota;
2. Belum adanya peningkatan kompetensi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang bagi kelompok penggerak pariwisata. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya pelatihan maupun diklat yang diberikan kepada kelompok penggerak pariwisata;
3. Sarana dan prasarana telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pengelolaan objek wisata seperti bantuan perbaikan atau pembuatan akses jalan ke lokasi objek wisata dan pembangunan aula atau gedung pertemuan di lokasi objek wisata. Namun, pemberian bantuan sarana dan prasarana tersebut belum diberikan secara merata kepada seluruh kelompok penggerak pariwisata dikarenakan ada beberapa lokasi objek wisata yang memiliki akses jalan susah untuk dilewati seperti terlalu curam ataupun jalan berbatu dan rentan longsor. Sehingga masih banyak objek wisata potensial di Kabupaten Sumedang yang belum bisa diakses masyarakat.

Untuk lebih jelasnya hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait peningkatan daya sosial tertuang dalam Tabel 1. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Kelompok Penggerak Wisata dari aspek daya sosial baru sebatas membantu promosi dan penyediaan akses jalan serta pembanguana gedung serbaguna atau aula di lokasi objek wisata. Sedangkan aspek penting dari daya sosial yang berupa kompetensi belum mampu dilaksanakan. Peningkatan kompetensi tentunya sangatlah diperlukan oleh anggota organisasi. Kompetensi dijelaskan Widodo dalam Mulia dan Saputra (2021) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Lebih lanjut Mulia dan Saputra (2021) menjelaskan bahwa kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka. Dengan demikian peningkatan kompetensi sangatlah diperlukan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kualitas dalam menjalankan pekerjaan. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan/diklat/seminar. Pelatihan bagi kelompok penggerak pariwisata menurut Tosida, Gunawan dan Andria (2015) dimaksudkan untuk memberdayakan kelompok

tersebut agar memiliki pengetahuan dan wawasan serta rasa percaya diri dalam menyampaikan usulan agar mendapat dukungan dari *stakeholders*.

Tabel 1. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Sosial

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
<ol style="list-style-type: none">1. Untuk memudahkan dalam mengakses segala informasi yang berkaitan dengan kelompok penggerak pariwisata di dinas pariwisata sudah terpenuhi, dan dinas memberikan peluang untuk mengakses informasi melalui media sosial, dll.2. Untuk saat ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan olahraga belum mengadakan diklat untuk kelompok penggerak pariwisata. Kemungkinan kedepannya akan mengadakan diklat yang bisa dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata.3. Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan olahraga sudah memberikan sarana prasarana yang baik kepada kelompok penggerak pariwisata untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya dengan lebih baik, seperti objek wisatanya.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya media sosial untuk memudahkan mengakses informasi.2. Sarana prasarana untuk Kelompok Penggerak Pariwisata sudah terpenuhi tetapi hanya sebagian.	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat di website disparbudsumedang.co.id Virtualtour sumedang.co.id2. Adanya objek wisata yang sudah terpenuhi sarana prasarana nya yaitu wisata desa Citengah yang mana sarana prasarananya sudah terpenuhi, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Selanjutnya aspek daya politik, daya politik menurut Akadun (2005) meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Daya politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan daya untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu meninggi sebagai pengaruh individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengarkan bersama-sama dengan suara asosiasi-asosiasi politik yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial, atau kelompok yang berkepentingan seperti kelompok partai atau buruh.

Hasil penelitian pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata dari aspek daya politik menunjukkan sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada kelompok penggerak pariwisata dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata yang tentunya pengambilan keputusan tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan pengelolaan pariwisata yang berlaku di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang sendiri. Selain itu, kelompok penggerak pariwisata memiliki tingkat partisipasi yang tinggi didalam memberikan masukan dan ide-ide kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melakukan pengelolaan objek wisata. Beberapa objek wisata di Kabupaten Sumedang mampu menciptakan bentuk promosi yang unik dalam bentuk edukasi maupun pengenalan budaya lokal. Dampak dari kreativitas tersebut mampu meningkatkan jumlah wisatawan baik dari wisatan lokal maupun luar kota.

Untuk lebih jelasnya hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait peningkatan daya politik tertuang dalam Tabel 2. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Politik.

Tabel 2. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Politik

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
<p>1. Untuk pemberian kewenangan dan tanggungjawab Dinas Pariwisata sudah cukup baik dalam memberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam hal apaun yang berhubungan dengan Kelompok Penggerak Pariwisata.</p> <p>2. Partisipasi kelompok penggerak pariwisata dalam pengambilan keputusan sebetulnya tidak terpaku dengan dinas. Akan tetapi partisipasi kelompok penggerak pariwisata memang sangat dibutuhkan karena kelompok penggerak pariwisata disini berperan sebagai stakeholder.</p> <p>3. Kelompok penggerak pariwisata dalam segi kreativitas sudah bisa mengelola, mengembangkan serta mempromosikan hasil pemikiran mereka. Adapun salah satunya yaitu di Desa Citengah. Namun dalam mengembangkan kreativitas tersebut kelompok penggerak pariwisata memiliki kendala dalam segi modal.</p>	<p>1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga khususnya bidang pariwisata sudah memberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan kompepar.</p> <p>2. Pengambilan keputusan kelompok penggerak pariwisata tidak selalu terpaku ke Dinas.</p> <p>3. Kelompok penggerak pariwisata dalam hal kreativitas sudah cukup kreatif.</p>	<p>1. Wewenang dan tanggung jawab kompepar tertuang di dalam Tupoksi dan SK Kompepar.</p> <p>2. Adanya desa pariwisata yang sudah berkembang contohnya di Desa Citengah.</p>

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Dengan demikian, partisipasi kelompok diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Partisipasi menurut Handayani (2006) dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Partisipasi masyarakat dijelaskan Slamet (2003) menekankan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sehingga partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik.

Aspek yang terakhir dari pemberdayaan adalah daya psikologis. Akadun (2005) menjelaskan daya psikologis di gambarkan sebagai rasa potensi individu yang menunjuk perilaku kepercayaan diri. Jika kemampuan ini hadir, ia di tunjukan dalam perilaku percaya diri. Daya psikologis sering kali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam domain sosial atau politik. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan terus menerus terhadap rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan daya sosial dan daya politiknya secara efektif. Untuk meningkatkan percaya diri diperlukan motivasi berupa pemenuhan kebutuhan material, penghargaan/*reward*, dan sanksi/*punishment*.

Hasil penelitian pada aspek daya psikologis menunjukkan bahwa pelaksanaan daya psikologis yang dilakukan Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari telah dipenuhinya kebutuhan material di objek wisata namun belum dapat diberikan secara merata disebabkan kondisi pandemi yang menghambat proses pemenuhan material tersebut. Selain itu, belum adanya sistem pemberian penghargaan kepada kelompok



penggerak pariwisata yang mampu mengelola objek wisata dengan baik maupun objek wisata yang mampu memberikan dampak kepada pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang. Belum adanya pemberian penghargaan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sumedang belum memiliki indikator penilaian keberhasilan pengelolaan objek wisata oleh kelompok penggerak pariwisata. Begitupun dengan sanksi, tidak ada sanksi khusus yang mengatur kelompok penggerak pariwisata. Adapun sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran merupakan sanksi yang berkaitan dengan peraturan yang bersifat umum yang telah ada di Kabupaten Sumedang seperti perizinan, perbuatan mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait peningkatan daya psikologis tertuang dalam Tabel 3. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Psikologis.

Tabel 3. Triangulasi Data Hasil Penelitian Peningkatan Daya Psikologis

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pemenuhan kebutuhan material ini sudah terpenuhi akan tetapi belum semua daerah pariwisata hal ini menjadi terhambat karena covid 19. Kemungkinan tahun depan dapat terpenuhi dengan baik dalam segi pemenuhan kebutuhan.2. Untuk pemberian penghargaan ini belum ada penghargaan yang diberikan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga kepada Kelompok Penggerak Pariwisata untuk saat ini pemerintah kabupaten belum melaksanakan kegiatan tersebut sehingga belum ada kompepar yang diberi <i>reward</i>, akan tetapi mudah-mudahan tahun depan dapat memberikan penghargaan kepada Kelompok Penggerak Pariwisata.3. Untuk pemberian sanksi ini belum ada kelompok penggerak pariwisata yang dikenakan sanksi tetapi kemungkinan dalam segi perizinan, kelembagaan, yang mana banyak hal yang mungkin sudah ada yang kena sanksi, dari pariwisata karena kealalaian, kecelakaan, dan ketidaknyamanan.	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk pemenuhan kebutuhan material sudah terpenuhi, namun baru sebagian tempat wisata. Karena terhambat Covid 19.2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga saat ini belum memberikan penghargaan terhadap kelompok penggerak pariwisata.3. Dalam segi sanksi untuk saat ini kelompok penggerak pariwisata belum ada yang dikenakan sanksi oleh Dinas.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Pandemi Covid-19 yang menghambat pemenuhan kebutuhan material2. Tidak adanya bentuk penghargaan yang diberikan kepada Kompepar yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan ataupun inovasi atau kreativitas dalam mengembangkan objek wisata.3. Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga belum pernah memberikan sanksi kepada kelompok penggerak pariwisata.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Pemberian motivasi diperlukan untuk meningkatkan daya psikologis dimana dalam daya ini berkaitan dengan kondisi individu yang diberdayakan. Motivasi menurut Sutrisno (2014) adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Pemberian motivasi erat kaitannya dengan reward dan punishment sebagaimana yang dijelaskan Gitosudarmo dan Sudita dalam Sugihen (2017) pemberian reward dan punishment bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sehingga seorang akan maksimal dalam bekerja. Nawawi

(2009) menjelaskan yang dimaksud dengan reward adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima atau diakui di lingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan Punishment menurut Purwanto (2009) merupakan ancaman hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki karyawan pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku dan memberikan pelajaran kepada pelanggar. Dengan demikian menurut Mangkunegara (2010) dapat terlihat bahwa reward merupakan bentuk yang positif, sedangkan punishment adalah sebagai bentuk yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang terdiri dari Pertama, kurangnya kompetensi kelompok penggerak pariwisata dari aspek pengetahuan dan kompetensi didalam pengelolaan objek wisata. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dikumentasi mengenai keterampilan dan kompetensi kelompok penggerak pariwisata pada Tabel 4. Triangulasi Data Hasil Penelitian Pengetahuan dan Kompetensi.

Kedua, pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumedang belum mampu menciptakan metode maupun sistem pemberdayaan yang berkesinambungan bagi kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dikumentasi mengenai metode pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata pada Tabel 5. Triangulasi Data Hasil Penelitian Metode Pemberdayaan.

Ketiga, belum adanya pendampingan bagi kelompok penggerak wisata yang objek wisatanya masih belum berkembang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dikumentasi mengenai pendampingan kelompok penggerak pariwisata pada Tabel 6. Triangulasi Data Hasil Penelitian Pendampingan Kelompok.

Keempat, beragamnya program kerja yang dimiliki masing-masing kelompok penggerak pariwisata menyebabkan munculnya masalah koordinasi diantara kelompok tersebut dalam pengintegrasian kinerja kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan dikumentasi mengenai koordinasi kelompok penggerak pariwisata pada Tabel 7. Triangulasi Data Hasil Penelitian Koordinasi Kelompok.

Tabel 4. Triangulasi Data Hasil Penelitian Pengetahuan dan Kompetensi

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
Pengetahuan dan kompetensi Kelompok Penggerak Parwisata belum semuanya memiliki pengetahuan yang luas mengenai pariwisata maka dari itu Kelompok Penggerak Pariwisata masih memerlukan pengetahuan yang mendalam.	Telah ada pembinaan terkait pariwisata namun belum dilakukan secara berkala atau terjadwal.	Tidak adanya jadwal yang pasti tentang pembinaan kelompok penggerak pariwisata.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Tabel 5. Triangulasi Data Hasil Penelitian Metode Pemberdayaan

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
Selama ini Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga belum mampu melakukan pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata bagi seluruh kelompok yang ada di Kabupaten Sumedang.	Beberapa kelompok penggerak pariwisata belum tersentuh kegiatan pemberdayaan.	Baru beberapa kelompok penggerak pariwisata di kecamatan yang telah diberikan pembinaan.



Pemberdayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan per Kecamatan. Sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama untuk mencapai target tersebut. Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini yang menghambat proses pemberdayaan. Pemberdayaan yang diberikan biasanya berbentuk seminar yang diberikan oleh pihak pengelola wisata yang sudah berkembang objek wisatanya dan memiliki jumlah pengunjung yang minimal stabil per bulannya. Belum berupa pelatihan berkelanjutan.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Tabel 6. Triangulasi Data Hasil Penelitian Pendampingan Kelompok

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
Belum adanya pendampingan secara berkala yang diberikan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Pendampingan yang diberikan selama ini baru sebatas konsultasi pengembangan objek wisata bagi Kelompok Penggerak Pariwisata yang secara langsung berkonsultasi ke Dinas. Terkadang Dinas akan menunjuk organisasi yang menjadi rekanan Dinas untuk membantu memberikan masukan terkait pengembang objek pariwisata kelompok tersebut.	Pendampingan diberikan ketika kelompok penggerak pariwisata membutuhkan konsultasi berupa masukan dan saran dari pengembangan objek wisata yang akan mereka lakukan.	Tidak adanya jadwal pendampingan bagi kelompok penggerak pariwisata.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Tabel 7. Triangulasi Data Hasil Penelitian Koordinasi Kelompok

Hasil Wawancara	Hasil Observasi	Dokumentasi
Setiap kelompok penggerak pariwisata memiliki program kerjanya masing-masing yang terdiri dari beberapa jenis kategori objek wisata yang bervariasi. Selain itu masih banyak kelompok penggerak pariwisata yang masih bersifat merintis objek wisatanya belum berkembang ataupun berkelanjutan. Dengan kondisi yang demikian kelompok tersebut fokus melakukan pembenahan internal dan belum mampu berkoordinasi secara baik dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan peningkatan daya tarik objek wisata di Kabupaten Sumedang.	Setiap kelompok penggerak pariwisata fokus melakukan program kerja mereka masing-masing dan fokus bebenah diri secara internal. Sehingga terkesan setiap kelompok berjalan secara masing-masing.	Belum adanya kegiatan bersama yang dapat dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata yang memiliki tipe atau jenis wisata yang sama.

Sumber: Hasil Penelitian 2021

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata sejalan dengan penjelasan Sedarmayanti (2014) yang menjelaskan bahwa dalam melakukan pemberdayaan dihadapi hambatan internal maupun eksternal yang terdiri dari: 1) lingkungan kerja; 2) Kejelasan informasi program kerja; 3) Pengetahuan dan kompetensi; dan 4) Tingkat kesalahan.

SIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan cukup baik. Pemberdayaan yang dilakukan memperhatikan aspek daya sosial,

daya politik, dan daya psikologis. Dari ketiga aspek pemberdayaan tersebut terlihat bahwa masih banyak hal yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang didalam melakukan pemberdayaan kepada kelompok pariwisata. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berupa pemberian pelatihan/diklat/seminar kepada kelompok penggerak pariwisata guna meningkatkan kompetensi kelompok tersebut, membuat sistem reward dan punishment yang mengatur tata kelola pengembangan pariwisata oleh kelompok penggerak pariwisata agar meningkatkan aspek daya psikologis dari kelompok tersebut.

Selain itu, terdapat pula beberapa hambatan dalam pemberdayaan kelompok penggerak pariwisata. Hambatan yang muncul mampu menghambat perkembangan kompetensi kelompok penggerak pariwisata maupun pengembangan objek wisatanya itu sendiri. Bermunculannya faktor penghambat disebabkan dari belum terintegrasinya sistem kerja diantara kelompok penggerak pariwisata maupun dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun, (2005). Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah. Bandung: CV Maulana.
- Handayani, S. (2006). Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi. Surakarta: Kompip Solo.
- Mangkunegara, AP. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nippi, A.T. (2019). Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 1. Diunduh di <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/21> pada tanggal 20 Desember
- Pangestika, T.A. (2019). Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Di Kabupaten Pemalang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Purwanto, M.N. (2006). Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati. (2019). Pemberdayaan Kelompok Tani Mitra Karya Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rindi, T.A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Wonokarto, Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur). *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Saputra, N., and Mulia, R.A., (2021). Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Ekotrans dan Erudisi*, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 1-24, doi:10.31933/jiee.v1i1.55. diunduh di <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/55/49> pada tanggal 15 Desember
- Sedarmayanti. (2014). Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata. Bandung: Refika Aditama.
- Sinaga & Supriono. (2010). Potensi dan Pengembangan Objek Wisata. Medan: Kertas Karya
- Slamet, M. (2003). Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Sugihen, P.D., (2017). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT. Pancarab Subur Makmur Distributor Produk Nestle Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Prenada Media
- Suryadana, M.L., dan Octavia, V., (2015). Pengantar Pemasaran Pariwisata. Bandung: Alfabeta.
- Tosidaa, E.T., Gunawan, I., & Adnria, F. (2015). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) dalam Pengembangan Potensi Wisata Bogor Selatan. *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol 1 No 2. Diunduh di <https://journal.ipb.ac.id/index.php/i-agrokreatif/article/view/11095/8590> pada tanggal 15 Desember

